

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Pemerintah termasuk dalam Organisasi Sektor Publik, dalam pelaksanaan keuangan dan akuntansinya organisasi ini menggunakan ilmu Akuntansi Sektor Publik yang tidak berorientasi pada laba, tujuannya melainkan untuk mengelola dana yang didapat dari masyarakat dan menghasilkan sarana dan prasarana umum yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan dalam organisasi tersebut. Dalam pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga internasional, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *the International Monetary Fund (IMF)*, dan *World Bank*, untuk menerapkan basis akrual kepada negara-negara di dunia menyebabkan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem

akuntansinya (Halim dan Kusufi, 2013: 204). Hal tersebut mendorong pemerintah pada tahun 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005.

Sampai saat ini masih ada Pemerintah Daerah yang menerapkan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual basis*). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Menjelang akhir tahun 2010 terdapat wacana pengajuan rancangan peraturan pemerintah yang akan mengubah basis SAP menjadi akrual penuh. Diperkirakan basis akrual ini mulai diterapkan untuk periode pelaporan keuangan tahun 2011 dan mungkin diberlakukan penuh untuk tahun anggaran 2015. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Keuangan akan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas.

Dalam *Study No. 14* yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (2011), mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pengguna untuk: (1) Menilai akuntabilitas untuk pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut. (2) Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas. (3) Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detil dalam *Study No. 4* tersebut mengatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat: (1) Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya. (2) Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi

kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya. (3) Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. (4) Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya. (5) Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesiapan pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual yaitu kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan profesionalisme pegawai.

Faktor yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Simanjuntak (2010) salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP adalah tersedianya SDM yang kompeten dan handal dalam bidang akuntansi. Sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menyusun perencanaan dan penempatan SDM yang kompeten. Menurut Hasibuan (2003: 244), sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Maka dari pada itu perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia aparatur karena dapat meningkatkan kemampuan aparatur sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan kualitas seorang aparatur atau pegawai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2013) di KPPN Malang

menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam penerapan basis akrual. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2009) dan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti, Sujana dan Adiputra (2015) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP basis akrual.

Faktor yang kedua adalah komitmen organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Simanjuntak (2010) juga menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Menurut Robbins (2006: 310) komitmen organisasi adalah suatu “keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu.” Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adventana (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual, penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldiani (2010) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu, menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan SAP basis akrual.

Faktor yang terakhir yaitu profesionalisme pegawai. Berdasarkan IFAC No. 14 (2003), dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah basis akrual

diperlukan ruang yang lebih luas atas pertimbangan profesional yang dilakukan oleh penyedia laporan keuangan dan auditor pemerintah. Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan ketrampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan, antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat atau pegawai merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi menurut Kurniawan (2005: 74) dalam Sihombing (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan (2012) menemukan bahwa profesionalisme menjadi alasan belum diterapkannya basis akrual pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan SAP basis akrual. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sitorus, Kalangi, dan Walandouw (2015) yang menyatakan adanya hubungan antara profesionalisme pegawai dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Pesatnya pembangunan nasional dalam segala bidang era reformasi ini memerlukan tenaga kerja yang handal. Artinya tenaga kerja yang dapat meneruskan kesinambungan pembangunan nasional melalui peningkatan sumber daya manusia yang ada secara profesional. Profesionalisme membutuhkan tenaga kerja yang berdedikasi tinggi, moralitas yang baik, loyalitas terjamin dan

mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Hubungan antara kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme ini telah dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Anita dkk (2013) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa profesionalisme sebagai faktor pendorong dalam peningkatan kualitas SDM karena dengan adanya profesionalisme ini mendorong seseorang untuk berkembang. Serta penelitian yang dilakukan oleh Bustami (2009) yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap profesionalisme pegawai.

Hubungan antara profesionalisme dan komitmen organisasi dapat dijelaskan dengan adanya penelitian dari Kalbers dan Fogarty (1995) yang menggunakan dua konstruk, komitmen ini dalam menguji hubungan antara profesionalisme dengan komitmen organisasi yaitu: komitmen afektif dan komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*). Penelitian Cahyani (2010: 11) tentang Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan, menyimpulkan adanya pengaruh antara profesionalisme dengan komitmen organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi berhubungan positif dengan konstruk profesionalisme pengabdian pada profesi.

Dari latar belakang diatas, penulis akan menguji pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Kota Batu, karena Standar Akuntansi yang digunakan saat ini masih basis kas menuju akrual, maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai kesiapan Pemerintah Daerah Kota

Batu dalam penerapan SAP berbasis akrual mengingat pada tahun 2015 seluruh Pemerintah Pusat maupun Daerah harus menggunakan basis akrual. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi dengan Profesionalisme Pegawai Sebagai Variabel Intervening Terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Batu)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan profesionalisme pegawai?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual?
3. Apakah komitmen organisasi dapat meningkatkan profesionalisme pegawai?
4. Apakah komitmen organisasi dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual?
5. Apakah profesionalisme pegawai dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual?
6. Apakah kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dengan profesionalisme pegawai sebagai variabel intervening?

7. Apakah komitmen organisasi dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dengan profesionalisme pegawai sebagai variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bahwa kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan profesionalisme pegawai.
2. Mengetahui bahwa kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
3. Mengetahui bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan profesionalisme pegawai.
4. Mengetahui bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
5. Mengetahui bahwa profesionalisme pegawai dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
6. Mengetahui bahwa kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dengan profesionalisme pegawai sebagai variabel intervening.
7. Mengetahui bahwa kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dengan profesionalisme pegawai sebagai variabel intervening.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh sumber daya manusia dan komitmen organisasi dengan profesionalisme pegawai sebagai variabel intervening terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Batu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di Pemerintahan Daerah Kota Batu. Disamping itu, pemerintah dapat melakukan pembenahan terhadap sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan profesionalisme pegawai.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan profesionalisme pegawai yang berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan pengantar masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini antara lain : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang mengharuskan Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Untuk mewujudkan penerapan standar akuntansi basis akrual yang baik perlu ditinjau dari beberapa faktor yaitu kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dengan variabel intervening yaitu profesionalisme pegawai. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori, konsep, dan argumentasi yang mendasari penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tentang pengelolaan keuangan daerah, basis akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (PP No. 24 tahun 2005), Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP No. 71 tahun 2010), kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan profesionalisme pegawai, serta membahas hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan pengembangan hipotesis penelitian menyangkut hipotesis apakah kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi dengan variabel intervening profesionalisme pegawai berpengaruh atau tidak terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan pendekatan penelitian, metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, menguraikan identifikasi variabel penelitian dengan variabel dependen yaitu kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, variabel independennya yaitu kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi, dengan variabel intervening yaitu profesionalisme. Membahas definisi operasional variabel, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian baik data primer maupun sekunder, metode pengumpulan data penelitian yaitu dengan kuesioner, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum Pemerintah Daerah Kota Batu, statistik deskriptif responden, analisis model, pembuktian hipotesis, serta membahas hasil yang telah diolah sehingga menghasilkan pembahasan yang dikehendaki untuk pengambilan kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yaitu apakah kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi dengan profesionalisme pegawai sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual, keterbatasan penelitian, dan saran atau rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batu untuk penelitian selanjutnya.